RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
TAHUN 2022

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan serta penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

10. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Agustus 2021

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

MASRUL KASMY

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR 28

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Daftar Tabel		ii
BAB I.	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II.	EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
	2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	37
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	39
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	48
	3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	49
	3.3. Program dan Kegiatan	51
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	60
BAB V.	PENUTUP	
	5.1. Catatan Penting	71
	5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	71
	5.3. Rencana Tindak Lanjut	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2020	10
Tabel 2.2	Realisasi Pelaksanaan Anggaran Program dan Kegiatan	11
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Provinsi Riau	22
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Utama	31
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	32
Tabel 2.6	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau sesuai Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2020	33
Tabel 2.7	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau sesuai Kab/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2020	33
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Riau	34
Tabel 2.9	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Riau	40
Tabel 2.10	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Provinsi Riau	47
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2022	50
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Riau	56
Tabel 4.1	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Riau	63

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah ini juga merupakan sebuah dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Secara hierarki penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;

4. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, progam dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD;
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

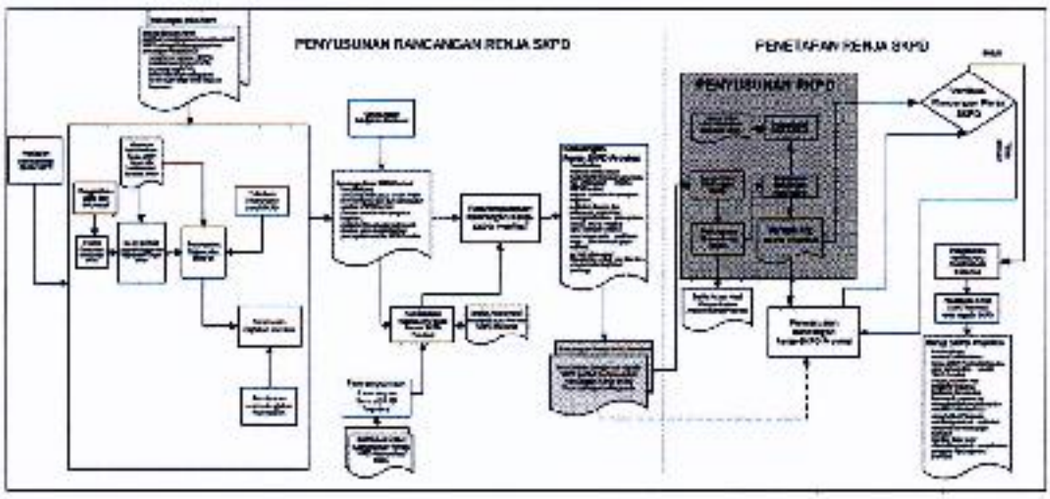

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Dalam penyusunannya Rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang);
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Selanjutnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, alur sinkronisasi perencanaan penganggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan Sistem Informasi dan Manajemen Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMRENAS) dapat dilihat pada gambar berikut ini :

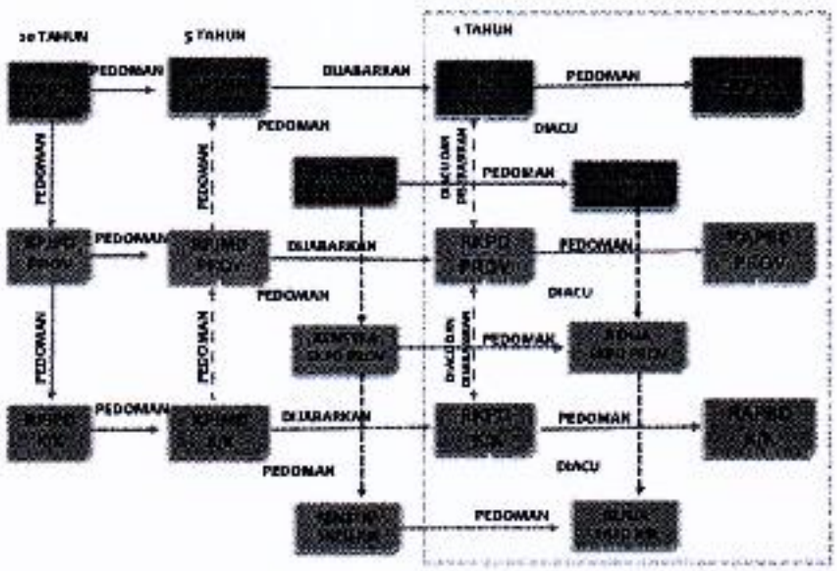

Gambar 1.2. Pola Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah dalam rangka evaluasi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditentukan pada APBD Murni tahun berjalan untuk mewujudkan misi ke-5 Gubernur Riau seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yaitu:

"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi"

Sekretariat DPRD adalah salah satu organisasi perangkat daerah di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau Provinsi Riau. Sekretariat DPRD mempunyai tugas "menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan".

Penyusunan Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan serta upaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2022 memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 25);
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022;
16. Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;
17. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Provinsi Riau di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau dan RPJMD Provinsi Riau di tahun 2022;

2. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2020 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Perangkat Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dengan substansi bab sebagai berikut :

1.1. Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah dan mengemukakan pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah;

1.2. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah;

1.4. Sistematika Penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan capaian renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, revier terhadap rancangan awal RKPD, penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat dengan subtansi bab sebagai berikut :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah menguraikan realisasi program/kegiatan yang tidak

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, dan tabel TC.29;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah menguraikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK dan lampiran table T-C.30;

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah menguraikan tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sulstanable Development Goals), Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD menguraikan Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda, lampiran tabel T-C.31;

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat menguraikan Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, lampiran tabel T-C.32.

Bab III Tujuan dan sasaran perangkat daerah memuat telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, dan program dan kegiatan dengan subtansi bab sebagai berikut:

3.1. Telahaan terhadap kebijakan nasional menguraikan tentang penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembagunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah menguraikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

3.3. Program dan Kegiatan menguraikan faktor- faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, lampiran tabel T-C.33

Bab IV Tujuan dan sasaran perangkat daerah memuat telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, dan program dan kegiatan.

Bab V Penutup berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tidak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Sebagaimana amanat Peraturan Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2020 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2020.

Tabel 2.1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%
1	2	3	4
Belanja Tidak Langsung	88.306.542.651,00	79.632.312.965,00	90,18
Belanja Langsung	334.082.344.869,00	317.472.536.807,00	95,03
Total Belanja	**422.388.887.520,00**	**397.104.849.772,00**	94,01

Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2020 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 dengan alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 sebesar Rp. 88.306.542.651,- dengan realisasinya sebesar Rp. 79.632.312.965,-atau 90.18%, sedangkan Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan sebesar Rp. 334.082.344.869,- dengan realisasinya sebesar Rp. 317.472.536.807,- atau 95.03%. Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau terdiri dari 4 Program dan 47 Kegiatan.

Dari Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 diperoleh Data Realisasi Fisik dan Keuangan sebagaimana dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN APBD-P	REALISASI KEUANGAN	%
1	2	3	4	5
	BELANJA LANGSUNG	**334.082.344.869,00**	**317.472.536.807,00**	**95,03**
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**21.798.310.195,00**	**20.694.114.212,00**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.850.000,00	59.850.000,00	95,23
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000.000,00	2.891.924.105,00	96,40
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.500.000,00	0,00	0,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.157.786.500,00	3.157.596.200,00	99,99
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	104.750.000,00	54.318.480,00	51,86
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	654.708.695,00	486.839.100,00	74,36
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	656.432.000,00	464.943.900,00	70,83
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	364.647.000,00	328.250.230,00	90,02
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.025.238.000,00	4.892.161.700,00	97,35
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.523.824.000,00	1.523.513.747,00	99,98
11	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	2.931.494.000,00	2.619.800.000,00	89,37
12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	4.249.080.000,00	4.214.916.750,00	99,20
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**16.220.738.000,00**	**12.945.342.933,00**	
13	Pembangunan Gedung Kantor	405.000.000,00	341.325.845,00	84,28
14	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	2.165.790.000,00	1.941.000.000,00	89,62
15	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	1.793.750.000,00	1.438.765.670,00	80,21
16	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2.568.500.000,00	2.132.560.773,00	83,03
17	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	557.500.000,00	262.957.250,00	47,17
18	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.853.850.000,00	1.607.163.100,00	86,69
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	1.966.000.000,00	1.441.692.265,00	73,33
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.299.500.000,00	1.835.838.730,00	79,84
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1.854.898.000,00	1.394.800.700,00	75,20
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	300.000.000,00	108.950.000,00	36,32
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	455.950.000,00	440.288.600,00	96,57
III	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**234.000.000,00**	**213.079.900,00**	
24	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	97.500.000,00	93.680.400,00	96,08
25	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	136.500.000,00	119.399.500,00	87,47
IV	**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	**295.829.296.674,00**	**283.619.999.762,00**	
26	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	7.410.864.000,00	7.137.388.252,00	96,31
27	Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau	10.410.006.000,00	8.034.181.398,00	77,18
28	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9.739.884.000,00	9.047.413.610,00	92,89
29	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	1.175.400.000,00	985.958.200,00	83,88
30	Rapat-rapat Paripurna	869.620.000,00	709.204.100,00	81,55
31	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	61.622.746.000,00	60.342.979.100,00	97,92

No.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN APBD-P	REALISASI KEUANGAN	%
1	2	3	4	5
32	Pembahasan LKPJ, APBD dan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, serta Tindak Lanjut LHP BPK RI	11.593.554.000,00	10.940.297.700,00	94,37
33	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	77.283.099.000,00	76.226.442.249,00	98,63
34	Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi	4.584.000.000,00	3.592.500.000,00	78,37
35	Penyediaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Riau	528.005.000,00	407.441.500,00	77,17
36	Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD	390.000.000,00	274.980.000,00	70,51
37	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	51.853.664.574,00	49.880.517.797,00	96,19
38	Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	2.276.210.000,00	2.269.173.493,00	99,69
39	Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD	2.352.000.000,00	2.000.964.900,00	85,08
40	Penyediaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	985.000.000,00	918.331.590,00	93,23
41	Penyediaan Jasa Sosialisasi,Informasi,Publikasi dan Kehumasan Lembaga DPRD	15.187.450.100,00	14.407.413.173,00	94,86
42	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	33.407.810.000,00	32.885.548.500,00	98,44
43	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2.423.164.000,00	2.289.127.500,00	94,47
44	Konsultasi dan Pengurusan Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	758.120.000,00	497.189.800,00	65,58
45	Peningkatan Kapasitas Layanan Kepada Lembaga DPRD	100.000.000,00	58.760.460,00	58,76
46	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Acara/Resepsi Pimpinan DPRD	200.000.000,00	187.780.000,00	93,89
47	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	678.700.000,00	526.406.440,00	77,56

Hasil Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2020 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.500.000,- . Realisasi keuangan mencapai Rp. 0,- atau 0% sedangkan realisasi fisik mencapai 0%. Kegiatan tidak direalisasi dikarenakan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhkan Barang Milik Daerah (RKBMD);

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 104.750.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 54.318.480,- atau 51,86% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Kegiatan tidak mencapai target dikarenakan sebagian kendaraan roda 4 sudah ditarik atau dikembalikan sedangkan kendaraan roda 2 beberapa diantaranya ada yang rusak
3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 557.500.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 262.957.250,- atau 47,17% sedangkan realisasi fisik mencapai 65,02%. Kegiatan tidak mencapai target dikarenakan kegiatan dilaksanakan hanya sesuai dengan kebutuhan rumah dinas Pimpinan dan ada yang tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhkan Barang Milik Daerah (RKBMD);
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 108.950.000,- atau 36,32% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Kegiatan tidak mencapai target dikarenakan kegiatan dilaksanakan hanya berdasarkan kebutuhan perawatan yang layak dilaksanakan saja;
5. Kegiatan Konsultasi dan Pengurusan Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD dengan alokasi anggaran Rp. 758.120.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 497.189.800,- atau 65,58% sedangkan realisasi fisik mencapai 65,70%. Kegiatan tidak mencapai target dikarenakan sesuai dengan himbauan Pemerintah bahwa dengan adanya Situasi Pandemi Covid-19 menyebabkan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau membatalkan Rencana Kunjungan ke Luar Negeri guna mencegah penyebaran Virus Corona;

6. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Kepada Lembaga DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 58.760.460,- atau 58,76% sedangkan realisasi fisik mencapai 60%. Kegiatan tidak mencapai target dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran kegiatan.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.850.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 59.850.000 atau 95,23% sedangkan realisasi fisik mencapai 96,02%;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 2.891.924.105,- atau 96,40% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%;
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.157.786.500,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 3.157.596.200,- atau 99,99% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%;
4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 654.708.695,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 486.839.100,- atau 74,36% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%;
5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 656.432.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 464.943.900,- atau 70,83% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%;
6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 364.647.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 328.250.230,- atau 90,02% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%;

7. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.025.238.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 4.892.161.700,- atau 97,35% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%;
8. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.523.824.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 1.523.513.747,- atau 99,98% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%;
9. Kegiatan Jasa Administrasi Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.931.494.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 2.619.800.000,- atau 89,37% sedangkan realisasi fisik mencapai 98,10%;
10. Kegiatan Jasa Keamanan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.249.080.000,-. Realisasi keuangan mencapai 4.214.916.750,- atau 99,20% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%;
11. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 405.000.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 341.325.845,- atau 84,28% sedangkan realisasi fisik mencapai 89,16%;
12. Kegiatan Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.165.790.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 1.941.000.000,- atau 89,62% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%;
13. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.793.750.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 1.438.765.670,- atau 80,21% sedangkan realisasi fisik mencapai 92,11%;
14. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.568.500.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 2.132.560.773,- atau 83,03 sedangkan realisasi fisik mencapai 87,97%;

15. Kegiatan Peralatan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.853.850.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 1.607.163.100,- atau 86,69% sedangkan realisasi fisik mencapai 95,97%;
16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.966.000.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 1.441.692.265,- atau 73,33% sedangkan realisasi fisik mencapai 91,35%;
17. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.299.500.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 1.835.838.730,- atau 79,84% sedangkan realisasi fisik mencapai 94,35%;
18. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.854.898.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 1.394.800.700,- atau 75,20% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%;
19. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 455.950.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 440.288.600,- atau 96,57% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%;
20. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 97.500.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 93.680.400,- atau 96,08% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%;
21. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.500.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 119.399.500,- atau 87,47% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%;
22. Kegiatan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.410.864.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 7.137.388.252,- atau 96,31 sedangkan realisasi fisik mencapai 99,34%;

23. Kegiatan Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.410.006.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 8.034.181.398,- atau 77,18 sedangkan realisasi fisik mencapai 84,12%;
24. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.739.884.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 9.047.413.610,- atau 92,89 sedangkan realisasi fisik mencapai 96,14%;
25. Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.175.400.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 985.958.200,- atau 83,88% sedangkan realisasi fisik mencapai 99,78%;
26. Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 869.620.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 709.204.100,- atau 81,55% sedangkan realisasi fisik mencapai 95,11%;
27. Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.622.746.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 60.342.979.100,- atau 97,92% sedangkan realisasi fisik mencapai 99,99%;
28. Kegiatan Pembahasan LKPJ, APBD dan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, serta Tindak Lanjut LHP BPK RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.593.554.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 10.940.297.700,- atau 94,37% sedangkan realisasi fisik mencapai 99,70%;
29. Kegiatan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.283.099.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 76.226.442.249,- atau 98,63% sedangkan realisasi fisik mencapai 99,25%;
30. Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.584.000.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 3.592.500.000,- atau 78,37% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%;

31. Kegiatan Penyediaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 528.005.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 407.441.500,- atau 77,17% sedangkan realisasi fisik mencapai 99,01%;
32. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 390.000.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 274.980.000,- atau 70,51% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%;
33. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.853.664.574,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 49.880.517.797,- atau 96,19% sedangkan realisasi fisik mencapai 98,54%;
34. Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.276.210.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 2.269.173.493,- atau 99,69% sedangkan realisasi fisik mencapai 99,72%;
35. Kegiatan Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.352.000.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 2.000.964.900,- atau 85,08% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%;
36. Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 985.000.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 918.331.590,- atau 93,23% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%;
37. Kegiatan Penyediaan Jasa Sosialisasi,Informasi,Publikasi dan Kehumasan Lembaga DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.187.450.100,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 14.407.413.173,- atau 94,86% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%;

38. Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.407.810.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 32.885.548.500,- atau 98,44% sedangkan realisasi fisik mencapai 99,64%;
39. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.423.164.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 2.289.127.500,- atau 94,47% sedangkan realisasi fisik mencapai 98,49%;
40. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Acara/Resepsi Pimpinan DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 187.780.000,- atau 93,89% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%;
41. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan alokasi sebesar Rp. 678.700.000,-. Realisasi keuangan mencapai Rp. 526.406.440,- atau 77,56% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Tahun 2020 tidak ada Program/Kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

1. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak terealisasi dikarenakan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhkan Barang Milik Daerah (RKBMD);
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional tidak mencapai target dikarenakan sebagian kendaraan

roda 4 sudah ditarik atau dikembalikan sedangkan kendaraan roda 2 beberapa diantaranya ada yang rusak.

3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas tidak mencapai target dikarenakan kegiatan dilaksanakan hanya sesuai dengan kebutuhan rumah dinas Pimpinan dan ada yang tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhkan Barang Milik Daerah (RKBMD);
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas tidak mencapai target dikarenakan kegiatan dilaksanakan hanya berdasarkan kebutuhan perawatan yang layak dilaksanakan saja;
5. Kegiatan Konsultasi dan Pengurusan Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD tidak mencapai target dikarenakan sesuai dengan himbauan Pemerintah bahwa dengan adanya Situasi Pandemi Covid-19 menyebabkan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau membatalkan Rencana Kunjungan ke Luar Negeri guna mencegah penyebaran Virus Corona;
6. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Kepada Lembaga DPRD tidak mencapai target dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran kegiatan.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Program/Kegiatan yang realisasi kinerja hasil/keluarannya tidak memenuhi target yang direncanakan akan mempunyai implikasi terhadap capaian Program/Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau yaitu :

1. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tidak mencapai target yang diharapkan;
2. Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja tidak memenuhi target

3. Capaian sasaran program dan sasaran strategis dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau juga tidak akan mencapai/memenuhi target yang direncanakan.

2.1.6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

1. Efisiensi alokasi belanja;
2. Penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target;
3. Penyesuaian target kinerja keluaran/hasil;
4. Merumuskan Kembali kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja Aparatur dalam meningkatkan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Provinsi Riau

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2014 s/d 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.00.				**PENDUKUNG**										
4.00.	**4.00.02.02.**			**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU**										
4.00.	**4.00.02.02.**	**01.**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	***Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik***				**100%**			**100%**		
4.00.	4.00.02.02.	01.	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	198.990	Surat	115.970	84.046	80701	96%	91.261	287.932	145%
4.00.	4.00.02.02.	01.	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	60	Bulan	48	192	192	100%	192	432	0%
4.00.	4.00.02.02.	01.	003.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	425	Tabung	325	60	0	0%	60	385	91%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2014 s/d 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.00.	4.00.02.02.	01.	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60	Bulan	48	12	12	100%	12	72	120%
4.00.	4.00.02.02.	01.	006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	805	Unit	517	58	58	100%	56	631	78%
4.00.	4.00.02.02.	01.	007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor	60	Bulan	48	62	62	100%	68	178	0%
4.00.	4.00.02.02.	01.	008.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	bulan	48	145	145	100%	148	341	0%
4.00.	4.00.02.02.	01.	009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik	60	Bulan	48	25	25	100%	24	97	162%
4.00.	4.00.02.02.	01.	010.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1.185.666	Porsi	735.554	243.954	243954	100%	286.317	1.265.825	107%
4.00.	4.00.02.02.	01.	011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	288	Kali	46	60	59	98%	78	183	64%
4.00.	4.00.02.02.	01.	012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor		0	OB	0	4776	4685	98%	1.443	6.128	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2014 s/d 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.00.	4.00.02.02.	01.	019.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa keamanan kantor	60	Bulan	48	852	852	100%	852	1.752	0%
4.00.	4.00.02.02.	01.	000.	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8.289	Unit	14	0	0	0%	0	14	0%
4.00.	4.00.02.02.	01.	000.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang disediakan	10	Orang	8	0	0	0%	0	8	80%
4.00.	4.00.02.02.	01.	000.	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Rentang waktu penyediaan jasasosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan yang disediakan	60	Bulan	48	0	0	0%	0	48	80%
4.00.	4.00.02.02.	01.	000.	Penataan Arsip Sekretariat DPRD Provinsi Riau	Jumlah Peralatan Penataan Arsip	24	Bulan	12	0	0	0%	0	12	50%
4.00.	**4.00.02.02.**	**02.**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	***Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja***				**100%**			**100%**	1	0%
4.00.	4.00.02.02.	02.	003.	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0	Unit	0	1	1	100%	0	1	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2014 s/d 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.00.	4.00.02.02.	02.	005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	0	Unit	0	4	4	100%	0	4	0%
4.00.	4.00.02.02.	02.	006.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	2370	Unit	103	20	18	90%	277	398	17%
4.00.	4.00.02.02.	02.	007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	122	Unit	115	150	65	43%	52	232	190%
4.00.	4.00.02.02.	02.	008.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	0	Unit	0	38	27	71%	78	105	0%
4.00.	4.00.02.02.	02.	009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	9420	Unit	232	30	12	40%	10	254	3%
4.00.	4.00.02.02.	02.	010.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	16	Unit	16	4	4	100%	4	24	150%
4.00.	4.00.02.02.	02.	012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	5	Gedung	4	1	1	100%	1	6	120%
4.00.	4.00.02.02.	02.	014.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	183	Unit	222	38	38	100%	35	295	161%
4.00.	4.00.02.02.	02.	015.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	0	Unit		4	4	100%	321	325	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2014 s/d 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.00.	4.00.02.02.	02.	016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	72	Jenis	544	18	18	100%	390	952	0%
4.00.	4.00.02.02.	02.	000.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	8440	Unit	42	0	0	0%	0	42	0%
4.00.	**4.00.02.02.**	**03.**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	***Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN***				**100%**			**100%**	1	0%
4.00.	4.00.02.02.	03.	001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0	Stel	0	195	195	100%	195	390	0%
4.00.	4.00.02.02.	03.	003.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	0	Stel	0	195	195	100%	195	390	0%
4.00.	**4.00.02.02.**	**05.**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	***Persentase meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara***				**100%**			**100%**	1	0%
4.00.	4.00.02.02.	05.	001.	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3378	Orang	158	0	0	0%	0	158	5%
4.00.	4.00.02.02.	05.	012.	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Rentang Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	60	Bulan	48	0	0	0%	0	48	80%
3.00.				**PENUNJANG URUSAN**										

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2014 s/d 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.00.	**3.00.01.**			**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**										
3.00.	**3.00.01.**	**15.**		**Program Pengembangan Data/Informasi**	***Persentase ketersediaan data/informasi***				**100%**			**0%**		
3.00.	3.00.01.	15.	053.	Partisipasi Dalam Pelaksanaan pameran tahunan	Jumlah/frekuensi Pameran Tahunan yang diikuti	5	Kali	4	0	0	0%	0	4	80%
4.00.02.				**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**										
4.00.02.	**4.00.02.02.**	**15.**		**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	***Persentase Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah***				**90%**			**91%**	**1**	**0%**
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	001.	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen program pembentukan peraturan daerah	0	Dokumen	0	1	1	100%	11	12	0%
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	002.	Penyusunan Ranperda Yang Berasal Dari DPRD Provinsi Riau	Jumlah Ranperda yang berasal dari DPRD Provinsi Riau	79	Ranperda	40	7	5	71%	5	50	63%
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	003.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas.	72	Ranperda	34	8	6	75%	6	46	64%
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	004.	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat Alat Kelengkapan Dewan yang dilaksanakan	2.640	Kali Rapat	1.539	534	340	64%	162	2.041	77%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2014 s/d 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	005.	Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah Rapat Paripurna	5	Kali	174	61	58	95%	61	293	0%
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	006.	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Reses	12	Kali	12	3	3	100%	3	18	0%
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	007.	Pembahasan LKPJ, Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, Pembahasan APBD-P Dan Pembahasan APBD	Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD, Perda APBD-P dan Perda APBD serta Rekomendasi DPRD atas LKPJ	23	Perda	17	5	5	100%	5	27	117%
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	008.	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	251	Kali	184	69	41	59%	39	264	105%
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	009.	Penyediaan Tenaga Ahli Dan Advokasi	Jumlah Tenaga Ahli, Kelompok Pakar / Tim Ahli, dan Advokasi	338	Orang	228	62	62	100%	71	361	107%
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	010.	Penyediaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Angta DPRD Provinsi Riau	Jumlah Rapat Paripurna Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD	15	Kali	11	7	3	43%	3	17	113%
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	011.	Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluanga yang mendapatkan Jasa Perawatan Kesehatan (Medical Check Up)	455	Orang	58	65	65	100%	65	188	41%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2014 s/d 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	012.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD	564	Kali	337	74	41	55%	47	425	75%
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	013.	Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah agenda keprotokolan pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	975	Kali	195	200	200	100%	195	590	61%
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	014.	Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Jumlah Rumah Tangga Pimpinan DPRD Yang Tersedia Logistiknya	12	Bulan	0	12	12	100%	12	24	200%
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	015.	Penyediaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	0	Stel	0	325	325	100%	325	650	0%
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	017.	Hearing/ Dialog dan Sosialisasi Peraturan Daerah	Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi yang dilakukan	41	Kali	30	12	12	100%	6	48	117%
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	018.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Mengikuti Bintek, Workshop, Seminar dan Teamwork Assesment	325	Kali	260	15	13	87%	3	276	85%
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	019.	Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Riau	Jumlah Kunjungan ke Luar Negeri	5	Kali	4	0	0	0%	1	5	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2014 s/d 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	020.	Konsultasi dan Pengurusan Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	Konsultasi dan Pengurusan Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	0	Dokumen	0	65	42	65%	65	107	0%
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	021.	Peningkatan Kapasitas layanan kepada Lembaga DPRD	Jumlah jasa penunjang layanan tugas dan fungsi lembaga DPRD	0	Laporan	0	2	1	50%	1	2	0%
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	022.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Acara/Resepsi Pimpinan DPRD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Acara/Resepsi Pimpinan DPRD	0	Jenis	0	5	5	100%	5	10	0%
4.00.02.	4.00.02.02.	01.	023.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	Bulan	48	102450	90745	89%	68.400	159.193	0%
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	024.	Rapat Koordinasi Dan Komunikasi Pimpinan Dan Sekretaris DPRD Riau	Jumlah keikutsertaan dalam pertemuan ADPSI dan Forkom Sekretaris DPRD	36	Kali	16	0	0	0%	0	16	44%
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	025.	Program Legislasi Daerah Provinsi Riau	Jumlah Kunjungan konsultasi Badan Legislasi Daerah untuk Perda yang akan dibahas	145	Kali	74	0	0	0%	0	74	51%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2014 s/d 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.00.02.	4.00.02.02.	15.	000.	Konsolidasi Hubungan Antar Lembaga	Jumlah konsolidasi antar lembaga	975	Kali	10	0	0	0%	0	10	1%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* adalah serangkaian indikator kinerja yang mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi atau ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis. Dalam Renstra Tahun 2019-2024, Sekretariat DPRD Provinsi Riau menyusun formulasi indikator-indikator kinerja serta merumuskan Indikator Kinerja Utama berdasarkan rangkaian indikator kinerja program/kegiatan. Berdasarkan sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Riau, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama

NO.	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU	Meningkatkan Pelayanan Bagi Peningkatan Kapasitas Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau	Meningkatnya Layanan Terhadap Lembaga DPRD Provinsi Riau	Indeks Kepuasan Layanan kepada Lembaga DPRD	Angka Indeks Layanan Kepuasan / 65 Anggota DPRD	74

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tug

as dan fungsi DPRD.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau yaitu *reformasi birokrasi* melalui strategi

Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Integritas Aparatur, serta Akuntabilitas dalam melayani tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dengan indikator kinerja setiap tahunnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR/KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
	2020	2021	2022	2023	2024		
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							
Indeks Kepuasan Layanan Kepada Lembaga DPRD	73	74	75	76	77	77	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
Persentase capaian layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	91	92	93	94	95	95	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
Persentase capaian layanan terhadap hak-hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD	91	92	93	94	95	95	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
Persentase capaian layanan terhadap peningkatan kapasitas	91	92	93	94	95	95	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
Presentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	91	92	93	94	95	95	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau beranggotakan 65 Orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Provinsi Riau terdiri dari 1 (satu) Orang Ketua dan 3 (tiga) Orang Wakil Ketua yang berasal dari Partai Politik dengan jumlah kursi terbanyak. Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau saat ini berdasarkan Partai Politik dan Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau Sesuai Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Partai Politik	2020		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Partai Demokrat	8	1	9
Partai Golongan Karya	7	4	11
Partai Hati Nurani Rakyat	1	0	1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	2	10
Partai Gerakan Indonesia Raya	8	0	8
Partai Amanat Nasional	5	2	7
Partai Nasdem	1	1	2
Partai Kebangkitan Bangsa	6	0	6
Partai Keadilan Sejahterah	5	2	7
Partai Bulan Bintang	0	0	0
Partai Persatuan Pembangunan	4	0	4
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0
Provinsi Riau	**53**	**12**	**65**

Tabel 2.7
Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau Sesuai Kab/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Kab/Kota	2020		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kuantan Singingi	34	1	35
Indragiri Hulu	39	1	40
Indragiri Hilir	39	6	45
Pelalawan	35	0	35
Siak	39	1	40
Kampar	41	4	45
Rokan Hulu	43	2	45
Bengkalis	41	4	45
Kep. Meranti	37	8	45
Rokan Hilir	26	4	30
Pekanbaru	90	20	110
Dumai	27	3	30
Provinsi Riau	**53**	**12**	**65**

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD Provinsi Riau

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau		Indeks Kepuasan Layanan (Point)	73	74	75	76	77	74	-	75	76	

Sebagaimana Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 bahwa di Tahun 2020 Sekretariat DPRD Provinsi Riau menetapkan besaran Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Layanan sebesar 72 Point.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja oleh tim melalui metode survey kepada 65 anggota DPRD, maka diperoleh hasil survey nilai indeks kepuasan layanan di akhir tahun 2020 dengan nilai realisasi kinerja sebesar 74 Point atau kategori BAIK.

Metode yang digunakan untuk memperoleh angka indeks tersebut dilakukan melalui metode penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan unsur pelayanan umum yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan memperhatikan 12 unsur pelayanan antara lain :

a. Persyaratan pelayanan;
b. Kemudahan Prosedur Pelayanan;
c. Kecepatan Pelayanan;
d. Kesesuaian Pelaksanaan Pelayanan dan Standar Pelayanan;
e. Keseuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
f. Kemampuan petugas dalam pelayanan;
g. Kesopanan dan keramahan petugas;
h. Kesesuaian antara pelaksanaan pelayanan yang diberikan dengan maklumat yang ditetapkan;
i. Penanganan terhadap pengaduan, saran dan masukan.

Sedangkan untuk unsur pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan meliputi:

a. Pelayanan dalam bidang umum
b. Pelayanan dalam bidang risalah dan produk hukum
c. Pelayanan dan bidang keuangan dan perencanaan

Perolehan angka indeks dihitung berdasarkan ketentuan unsur- unsur pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik dengan mempertimbangkan unsur pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi digabung maka unsur pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau di Tahun 2020 mempunyai nilai kinerja sebesar berada dalam 74,01 Point kategori BAIK.

Dari capaian kinerja tersebut diketahui bahwa target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau di tahun 2020 yaitu sebesar 72 Point telah terpenuhi dan bahkan memperoleh capaian kinerja melebihi target sebesar 2,01 Point.

Untuk lebih detailnya, capaian kinerja sebesar 74,01 Point dengan unsur pelayanan mempertimbangkan TUPOKSI dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Nilai rata-rata persepsi pelayanan yang diperoleh Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebesar 72,95 dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya.
b. Nilai rata-rata persepsi pelayanan yang diperoleh Bagian Risalah dan Produk Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebesar 73,05 dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya.
c. Nilai rata-rata persepsi pelayanan yang diperoleh Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebesar 72,95 dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya.

Dari Nilai rata-rata persepsi yang diperoleh dari 3 (tiga) bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Riau dapat diketahui bahwa 3 (tiga) bagian tersebut telah melampaui capaian kinerjanya, tetapi diharapkan Bagian-baian tersebut lebih dapat meningkatkan layanannya kepada segenap anggota DPRD. Serta apabila ke

3 (tiga) angka indeks tersebut diatas diakumulasikan ke dalam angka IKM, maka diperoleh angka 74,01.

Diharapkan ditahun 2020 dan 2021 Program dan Kegiatan menjadi lebih baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD sehingga dapat lebih meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Layanan Terhadap DPRD.

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah penting, karena kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitasi terhadap pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perhatian atau fokus utama dalam penentuan isu-isu strategis pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah :

Faktor Internal :

a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretarariat DPRD yang belum optimal;
b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
d. Layanan Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD masih kategori baik tapi masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya. Hal ini tentunya akan memacu Sekretariat DPRD dalam melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan.

Faktor Eksternal :

a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD;
b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan;
d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya;
e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

Untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang langkah-langkah antisipasi yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas SDM lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan;
2. Melakukan formasi pegawai secara efektif dan efisien guna mendukung kinerja SKPD;
3. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

Adapun rekomendasi dan catatan strategis yang dapat diangkat dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Kembali kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja Aparatur dalam meningkatkan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Melakukan penyesuaian terhadap target kinerja guna mendukung program/kegiatan yang dilaksanakan;
3. Melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran yang dibutuhkan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau disusun berdasarkan arahan/panduan yang diberikan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, yang kemudian dibahas secara bersama-sama melalui Forum Perangkat Daerah, untuk kemudian dibahas pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DRPD Provinsi Riau

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA LANGSUNG				**273.976.701.667,12**	**BELANJA LANGSUNG**				**193.966.196.900,00**	
	PENDUKUNG				**273.976.701.667,12**	**PENDUKUNG**				**193.966.196.900,00**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		**Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik (%)**	100%	**23.048.062.567,76**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik (%)**	100%	**23.222.204.700,00**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	Jumlah surat yang dikirim	84,045 Surat	66.150.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pekanbaru	Jumlah surat yang dikirim	84046 surat	60.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pekanbaru	Jumlah rekening yang dibayar	192 Rekening	4.410.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pekanbaru	Jumlah rekening yang dibayar	192 rekening	3.600.000.000	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	58 unit	115.486.875,00	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Unit	30.000.000	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	4,826 OB	2.694.951.000,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	3.377.865.000	
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 Bulan	2.756.250.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	58 unit	100.000.000	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pekanbaru	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	62 Jenis	1.363.224.544,75	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pekanbaru	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	62 jenis	650.000.000	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	175 Jenis	661.500.000,00	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	175 jenis	500.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	25 Jenis	606.375.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	25 Jenis	345.672.700	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pekanbaru	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	60 Unit	33.075.000,00	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Pekanbaru	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	243954 Porsi	5.342.688.000	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Provinsi Riau	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	243,954 Porsi	5.174.989.194,43	Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Luar Provinsi Riau	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	28 Kali	1.858.500.000	
11	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Pekanbaru	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	28 Kali	1.858.560.953,58	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Pekanbaru	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	4826 OB	2.869.094.000	
12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Pekanbaru	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	852 OB	3.307.500.000,00	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Pekanbaru	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	852 OB	4.488.385.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		**Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja**	**100%**	**11.428.527.339,80**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja**	**100%**	**10.131.297.500,00**	
3	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Pekanbaru	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	20 Unit	516.681.600,00	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Pekanbaru	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	20 Unit	500.000.000	
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	150 Unit	513.600.000,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	150 Unit	500.000.000	
5	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Pekanbaru	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	15 Unit	1.160.725.739,80	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Pekanbaru	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	15 Unit	750.000.000	
6	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	12 Unit	3.100.000.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	12 Unit	2.366.897.500	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	2 Unit	1.155.600.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Pekanbaru	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	2 Unit	1.155.600.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif [Rp.000]	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana [Rp.000]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	1 Ruang	1.926.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	1.926.000.000	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	30 Unit	2.182.800.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pekanbaru	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	30 Unit	2.182.800.000	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan rumah jabatan/Dinas	Pekanbaru	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	4 Unit	385.200.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan rumah jabatan/Dinas	Pekanbaru	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	4 Unit	370.000.000	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	18 Unit	487.920.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	18 Unit	380.000.000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Menurunnya persentase aparatur dalam proses penegakan disiplin aparatur dan yang mendapat teguran/sanksi	100%	263.922.907,46	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Menurunnya persentase aparatur dalam proses penegakan disiplin aparatur dan yang mendapat teguran/sanksi	100%	273.000.000,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Pekanbaru	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	195 Stel	111.796.175,26	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Pekanbaru	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	195 Stel	136.500.000	
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pekanbaru	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	195 Stel	152.126.732,20	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pekanbaru	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	195 Stel	136.500.000	
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT					**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**					
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Persentase Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	92%	239.236.188.852,10	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Persentase Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	93%	160.339.694.700,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pekanbaru	Jumlah Rapat Konsultasi	1 Dokumen	4.808.580.000,00	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pekanbaru	Jumlah Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	4.420.000.000	
2	Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Riau	6 Ranperda Inisiatif DPRD	6.869.400.000,00	Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Riau	6 Ranperda Inisiatif DPRD	6.869.400.000	
3	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pekanbaru	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas	6 Ranperda	6.869.400.000,00	Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	Pekanbaru	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas	6 Ranperda	5.181.786.200	
4	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Pekanbaru	Jumlah Rapat Alat Kelengkapan Dewan	342 Kali	798.911.220,00	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Pekanbaru	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan	342 Kali	650.000.000	
5	Rapat-Rapat Paripurna	Pekanbaru	Jumlah Rapat Paripurna	61 Kali	1.144.900.000,00	Rapat-Rapat Paripurna	Pekanbaru	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	61 Kali	1.144.900.000	
6	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	Provinsi Riau	Jumlah Jumlah reses Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	75.500.000.000,00	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	Provinsi Riau	Jumlah reses Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	38.399.000.000	
7	Pembahasan LKPJ, APBD dan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, serta Tindak Lanjut LHP BPK RI	Pekanbaru	Jumlah Perda dan rekomendasi	5 Perda/ Rekomendasi	8.809.232.358,19	Pembahasan LKPJ, APBD dan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, serta Tindak Lanjut LHP BPK RI	Pekanbaru	Jumlah Perda dan rekomendasi	5 Perda/ Rekomendasi	8.697.900.000	
8	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	Dalam dan Luar Provinsi Riau	Jumlah Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	50 Kali	44.000.000.000,00	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	Dalam dan Luar Provinsi Riau	Jumlah Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	50 Kali	34.000.000.000	
9	Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi	Pekanbaru	Tenaga Ahli, Kelompok Pakar / Tim Ahli, dan Advokasi	62 Orang	5.500.000.000,00	Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi	Pekanbaru	Jumlah Tenaga Ahli dan Advokasi yang disediakan	62 Orang	6.264.000.000	
10	Penyediaan Pengganti Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah paripurna PAW Anggota DPRD Provinsi Riau	3 Kali	308.670.764,50	Penyediaan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Riau	Pekanbaru	Jumlah paripurna PAW Anggota DPRD Provinsi Riau	3 Kali	330.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pimpinan dan anggota DPRD	Pekanbaru	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau yang Mendapatkan Jasa Perawatan (Medical Check Up)	65 Orang	400.000.000,00	Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pimpinan dan anggota DPRD	Pekanbaru	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Jasa Perawatan Kesehatan (Medical Check Up)	65 Orang	395.000.000	
12	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Dalam dan Luar Provinsi Riau	Jumlah Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD	55 Kali	33.000.000.000,00	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Dalam dan Luar Provinsi Riau	Jumlah kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD	55 Kali	15.153.362.000	
13	Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	Dalam dan Luar Provinsi Riau	Jumlah agenda keprotokolan pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	300 Kal	1.717.350.000,00	Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	Dalam dan Luar Provinsi Riau	Jumlah agenda keprotokolan pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	300 Kali	1.000.000.000	
14	Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Pekanbaru	Rentang Waktu Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD	12 Bulan	2.640.000.000,00	Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Pekanbaru	Rentang waktu ketersediaan logistik rumah tangga Pimpinan DPRD	12 Bulan	2.640.000.000	
15	Penyediaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	Pekanbaru	Jumlah pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	325 Stel	1.314.000.000,00	Penyediaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	Pekanbaru	Jumlah pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	325 Stel	1.350.000.000	
16	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan Lembaga DPRD	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan	12 Bulan	5.724.500.000,00	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan Lembaga DPRD	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan	12 Bulan	3.183.400.000	
17	Hearing/Dialog dan Sosialisasi Peraturan Daerah	Provinsi Riau	Hearing/Dialog dan Sosialisasi Peraturan Daerah	13 Kali	11.951.095.509,41	Hearing/Dialog dan Sosialisasi Peraturan Daerah Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Hearing/Dialog dan Sosialisasi perda yang dilakukan	13 Kali	10.000.000.000	
18	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Dalam dan Luar Provinsi Riau	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali	8.121.626.000,00	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Dalam dan Luar Provinsi Riau	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kal	5.531.025.000	
19	Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan	Luar Negeri	Jumlah Kunjungan ke Luar Negeri	1 Kali	18.164.643.000,00	Kunjungan Luar Negeri Pimpinan	Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kali	13.059.921.500	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Anggota DPRD Provinsi Riau					dan Anggota DPRD Provinsi Riau					
20	Konsultasi dan Pengurusan Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Provinsi Riau	Jumlah dokumen persyaratan kunjungan luar negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	65 dokumen	686.940.000,00	Konsultasi dan Pengurusan Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Provinsi Riau	Jumlah dokumen persyaratan kunjungan luar negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	65 Dokumen	600.000.000	
21	Peningkatan Kapasitas layanan Kepada Lembaga DPRD	Pekanbaru	Jumlah jasa penunjang layanan tugas dan fungsi lembaga DPRD	3 Laporan	220.000.000,00	Peningkatan Kapasitas layanan Kepada Lembaga DPRD	Pekanbaru	Jumlah jasa penunjang layanan tugas dan fungsi lembaga DPRD	3 Laporan	100.000.000	
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Acara/Resepsi Pimpinan DPRD	Pekanbaru	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang disewa	5 Jenis	228.980.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Acara/Resepsi Pimpinan DPRD	Pekanbaru	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan yang disewa	5 Jenis	100.000.000	
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Pekanbaru	Jumlah koran/majalah dan peraturan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	125000 Eks	457.960.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Pekanbaru	Jumlah koran/majalah dan peraturan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	125000 Eks	400.000.000	
					273.976.701.667,12					**193.966.196.900,00**	

Berdasarkan Tabel Setelah dilakukan perumusan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau terdapat penyesuaian kebutuhan anggaran dari total Pagu Indikatif Rp. 273.976.701.667,12 menjadi Rp. 193.966.196.900,00-. Hasil analisa kebutuhan tersebut berdasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.

Adapun pagu anggaran per program yang dilakukan penyesuaian terhadap hasil analisa kebutuhan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 23.048.062.567,76 bertambah menjadi RP. 23.222.204.700,00;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur sebesar Rp. 11.428.527.339,80 berkurang menjadi 10.131.297.500,00;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 263.922.907,46 bertambah menjadi Rp. 273.000.000,00;
4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 239.236.188.852,10 bertambah menjadi Rp. 160.339.694.700,00.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan dan dukungan terhadap anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Provinsi Riau

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, karena tidak memiliki hubungan hierarki dan kepentingan secara langsung.

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Nasional dan Kebijakan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya, layanan public serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang yang terkait dengan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau, yaitu :

a. Visi : Terwujudnya Pelayanan Prima terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau
b. Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
c. Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Bagi Peningkatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau
d. Sasaran :
   - Meningkatnya Layanan Terhadap Lembaga DPRD Provinsi Riau;
   - Meningkatnya Layanan Terhadap Hak-Hak Keuangan, Administratif, dan Keprotokolan DPRD;

- Meningkatnya Layanan terhadap Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD.

e. Strategi : Peningkatan kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap penyelenggararaan pelayanan Sekretariat Daerah.

f. Kebijakan : Meningkatkan produktifitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD melalui kualitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, serta optimalisasi pengelolaan aset.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sekretaris DPRD Provinsi Riau memiliki tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, memiliki tugas pokok sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;

b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pada bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut diatas, Sekretaris DPRD Provinsi Riau memiliki fungsi menyelenggarakan seperti; fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyelenggaraan administrasi keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Target capaian pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2022 mengacu pada Penetapan Kinerja pada Tahun 2021 yang dihubungkan dengan RKPD

2022. Dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Riau yaitu;

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau	1. Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau 2. Meningkatnya Layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif, dan Keprotokolan DPRD 3. Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau juga disusun melalui evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau pada tahun 2020 dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi untuk masing-masing kegiatan sesuai kondisi ekonomi daerah.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada Rencana Kerja Tahun 2022 pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Riau berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Efisiensi dan rasionalisasi anggaran daerah;

   Rencana efisiensi belanja Sekretariat DPRD Provinsi Riau sesuai kebijakan rasionalisasi anggaran terhadap menurunnya kemampuan keuangan daerah dan penyesuaian prioritas anggaran daerah.

2. Penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan tersebut berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan anggaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga dengan keterbatasan anggaran yang ada dipandang perlu melakukan penyesuaian belanja untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan pelayanan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD.

3. Meningkatkan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kualitas pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau. Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Provinsi Riau. Hal tersebut harus didukung dengan efektifitas belanja kegiatan melalui review anggaran kegiatan dan pelaporan.
4. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi. Untuk meningkatkan capaian kinerja dengan kemampuan keuangan yang makin menurun memerlukan perencanaan kinerja dan anggaran yang efektif. Sehingga Perangkat Daerah dituntut lebih selektif dalam distribusi anggaran program/kegiatan. Khusus di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau akan melakukan efisensi belanja modal dengan memaksimalkan pemanfaatan sarana yang tersedia.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung tercapainya target Rencana Strategis pada tahun 2022 maka, dirumuskan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2022. Secara keseluruhan rekapitulasi Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang diusulkan pada tahun 2022 berjumlah 4 Program dan 46 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya pelayanan adminstrasi perkantoran dalam rangka mendukung tugas-tugas kesekretariatan Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program ini, antara lain :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Makanan dan Minuman;
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor;
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dimaksud untuk peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang layak pakai untuk menunjang kegiatan dan tugas DPRD. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini, antara lain :

- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin aparatur melalui penyediaan pakaian dinas beserta atributnya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

4. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program ini di maksudkan untuk meningkatkan kapasitas kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah melalui pelayanan Sekretariat DPRD dan fasilitasi agenda-agenda rapat dewan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini, antara lain :

- Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Penyusunan Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Riau;
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan;
- Rapat-Rapat Paripurna;
- Reses Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Pembahasan LKPJ, APBD dan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD serta Tindak Lanjut LHP BPK RI;
- Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan;
- Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi;
- Penyediaan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Riau;
- Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan;
- Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD;
- Penyediaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;

- Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi, dan Kehumasan Lembaga DPRD;
- Hearing/Dialog dan Sosialisasi Peraturan Daerah;
- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau;
- Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau;
- Konsultasi dan Pengurusan Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Peningkatan Kapasitas Layanan kepada Lembaga DPRD;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Acara/Resepsi Pimpinan DPRD;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Adapun rumusan rencana kegiatan per program pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2022 diukur melalui Indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Nilai target tahun 2022 untuk masing-masing sasaran strategis ditetapkan sesuai target capaian yang dinyatakan dalam angka capaian realisasi atas indikator-indikator kinerja yang berorientasi kepada indikator kinerja sasaran.

Secara garis besar Perumusan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2022 dengan Rancangan Awal RKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau terdapat perbedaan pada total pagu indikatif. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan anggaran pada masing-masing program dan kegiatan yang pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 273.976.701.667,12 dah setelah dilakukan penyesuaian kebutuhan anggaran menjadi Rp. 193.966.196.900,00-.

Adapun pagu anggaran per program yang dilakukan penyesuaian terhadap hasil analisa kebutuhan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 23.048.062.567,76 bertambah menjadi RP. 23.222.204.700,00;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur sebesar Rp. 11.428.527.339,80 berkurang menjadi 10.131.297.500,00;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 263.922.907,46 bertambah menjadi Rp. 273.000.000,00;
4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 239.236.188.852,10 bertambah menjadi Rp. 160.339.694.700,00.

Penetapan target kinerja dan pagu anggaran berdasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Target kinerja dan pagu anggaran untuk masing-masing program/kegiatan yang hendak dicapai dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir didalam Tabel Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Riau berikut :

Tabel 3.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Provinsi Riau

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Tagging	Catatan Penting	Pra Kiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
4.0.02.02.0.	**NON URUSAN**				**33.626.502.200,00**					**37.307.857.490,00**
4.0.02.02.0.0.	**NON URUSAN**				**33.626.502.200,00**					**37.307.857.490,00**
4.0.02.02.0.0.00.	**NON URUSAN**				**33.626.502.200,00**					**37.307.857.490,00**
4.0.02.02.0.0.00.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100 Persen**	**23.222.204.700,00**				**100 Persen**	**24.751.328.177,00**
4.0.02.02.0.0.00.01.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	Kota Pekanbaru	84046 surat	60.000.000	**Pendapatan Asli Daerah**			91500 surat	70.780.500,00
4.0.02.02.0.0.00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Kota Pekanbaru	192 rekening	3.600.000.000	**Pendapatan Asli Daerah**			192 rekening	4.718.700.000,00
4.0.02.02.0.0.00.01.003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Pekanbaru	60 Unit	30.000.000	**Pendapatan Asli Daerah**			60 Unit	35.390.250,00
4.0.02.02.0.0.00.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Pekanbaru	12 bulan	3.377.855.000	**Pendapatan Asli Daerah**			12 bulan	2.949.187.500,00
4.0.02.02.0.0.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Pekanbaru	58 unit	100.000.000	**Pendapatan Asli Daerah**			58 unit	123.570.956,00
4.0.02.02.0.0.00.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Kota Pekanbaru	62 jenis	650.000.000	**Pendapatan Asli Daerah**			62 jenis	1.458.650.263,00
4.0.02.02.0.0.00.01.008.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Kota Pekanbaru	175 jenis	500.000.000	**Pendapatan Asli Daerah**			175 jenis	707.806.000,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Tagging	Catatan Penting	Pra Kiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
4.0.02.02.0.0.00.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Pekanbaru	25 Jenis	345.672.700	Pendapatan Asli Daerah			25 Jenis	648.821.250,00
4.0.02.02.0.0.00.01.010.	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kota Pekanbaru	243954 Porsi	5.342.688.000	Pendapatan Asli Daerah			295000 Porsi	5.537.238.438,00
4.0.02.02.0.0.00.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah Provinsi Riau	28 Kali	1.858.500.000	Pendapatan Asli Daerah			28 Kali	2.078.561.450,00
4.0.02.02.0.0.00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	4826 OB	2.869.094.000	Pendapatan Asli Daerah			4826 OB	2.883.597.570,00
4.0.02.02.0.0.00.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	Kota Pekanbaru	852 OB	4.488.385.000	Pendapatan Asli Daerah			852 OB	3.539.025.000,00
4.0.02.02.0.0.00.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur**		**100 Persen**	**10.131.297.500,00**				**100 Persen**	**12.279.102.345,00**
4.0.02.02.0.0.00.02.006.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	Kota Pekanbaru	20 Unit	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah			20 Unit	552.849.312,00
4.0.02.02.0.0.00.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kota Pekanbaru	150 Unit	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah			150 Unit	549.552.000,00
4.0.02.02.0.0.00.02.008.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	Kota Pekanbaru	15 Unit	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah			15 Unit	1.241.976.541,00
4.0.02.02.0.0.00.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Kota Pekanbaru,	12 Unit	2.366.897.500	Pendapatan Asli Daerah			12 Unit	3.310.000.000,00
4.0.02.02.0.0.00.02.010.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	Kota Pekanbaru	2 Unit	1.155.600.000	Pendapatan Asli Daerah			2 Unit	1.236.492.000,00
4.0.02.02.0.0.00.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	Kota Pekanbaru	1 Unit	1.926.000.000	Pendapatan Asli Daerah			1 Unit	2.060.820.000,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Tagging	Catatan Penting	Pra Kiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
4.0.02.02.0.0.00.02.014.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kota Pekanbaru	30 Unit	2.182.800.000	**Pendapatan Asli Daerah**			32 Unit	2.335.596.000,00
4.0.02.02.0.0.00.02.015.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan rumah jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Pekanbaru	4 Unit	370.000.000	**Pendapatan Asli Daerah**			4 Unit	412.164.000,00
4.0.02.02.0.0.00.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Pekanbaru	18 Unit	380.000.000	**Pendapatan Asli Daerah**			18 Unit	573.652.492,00
4.0.02.02.0.0.00.03.	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**Persentase Tingkat Kehadiran ASN**		**100 Persen**	**273.000.000,00**				**100 Persen**	**283.426.968,00**
4.0.02.02.0.0.00.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Kota Pekanbaru	195 Stel	136.500.000	**Pendapatan Asli Daerah**			195 Stel	123.385.984,00
4.0.02.02.0.0.00.03.003.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Kota Pekanbaru	195 Stel	136.500.000	**Pendapatan Asli Daerah**			195 Stel	160.040.984,00
4.0.02.02.4.	**PENDUKUNG**				**160.339.694.700,00**					**256.915.886.311,00**
4.0.02.02.4.0.	**PENDUKUNG**				**160.339.694.700,00**					**256.915.886.311,00**
4.0.02.02.4.0.02.	**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**				**160.339.694.700,00**					**256.915.886.311,00**
4.0.02.02.4.0.02.15.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**	**Presentase Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**		**93 Persen**	**160.339.694.700,00**				**94 Persen**	**256.915.886.311,00**
4.0.02.02.4.0.02.15.001.	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Pekanbaru	1 Dokumen	4.420.000.000	**Pendapatan Asli Daerah**			1 Dokumen	5.145.180.600,00
4.0.02.02.4.0.02.15.002.	Penyusunan Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Riau	Jumlah Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Riau	Kota Pekanbaru	6 Ranperda Inisiatif DPRD	6.869.400.000	**Pendapatan Asli Daerah**			10 Ranperda Inisiatif DPRD	7.350.258.000,00
4.0.02.02.4.0.02.15.003.	Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas	Kota Pekanbaru	6 Ranperda	5.181.786.200	**Pendapatan Asli Daerah**			10 Ranperda	7.350.258.000,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Tagging	Catatan Penting	Pra Kiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
4.0.02.02.4.0.02.15.004.	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan	Kota Pekanbaru	342 Kali	650.000.000	Pendapatan Asli Daerah			342 Kali	854.835.005,00
4.0.02.02.4.0.02.15.005.	Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	Kota Pekanbaru	61 Kali	1.144.900.000	Pendapatan Asli Daerah			61 Kali	1.225.043.000,00
4.0.02.02.4.0.02.15.006.	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah reses Pimpinan dan Anggota DPRD	Dalam Daerah Provinsi Riau	3 Kali	38.399.000.000	Pendapatan Asli Daerah			3 Kali	77.000.000.000,00
4.0.02.02.4.0.02.15.007.	Pembahasan LKPJ, APBD dan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, serta Tindak Lanjut LHP BPK RI	Jumlah Perda dan rekomendasi	Kota Pekanbaru	5 Perda/ Rekomendasi	8.697.900.000	Pendapatan Asli Daerah			5 Perda/ Rekomendasi	9.425.878.623,00
4.0.02.02.4.0.02.15.008.	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan	Dalam dan Luar Daerah Provinsi Riau	50 Kali	34.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah			60 Kali	55.000.000.000,00
4.0.02.02.4.0.02.15.009.	Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi	Jumlah Tenaga Ahli dan Advokasi yang disediakan	Kota Pekanbaru	62 Orang	6.264.000.000	Pendapatan Asli Daerah			62 Orang	5.500.000.000,00
4.0.02.02.4.0.02.15.010.	Penyediaan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah paripurna PAW Anggota DPRD Provinsi Riau	Kota Pekanbaru	3 Kali	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah			3 Kali	330.277.718,00
4.0.02.02.4.0.02.15.011.	Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Jasa Perawatan Kesehatan (Medical Check Up)	Kota Pekanbaru	65 Orang	395.000.000	Pendapatan Asli Daerah			65 Orang	400.000.000,00
4.0.02.02.4.0.02.15.012.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD	Dalam dan Luar Daerah Provinsi Riau	55 Kali	15.153.362.000	Pendapatan Asli Daerah			65 Kali	34.623.383.070,00
4.0.02.02.4.0.02.15.013.	Penyelenggaraan Keprotokolan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah agenda keprotokolan pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan	Dalam dan Luar Daerah Provinsi Riau	300 Kali	1.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah			300 Kali	1.837.564.500,00
4.0.02.02.4.0.02.15.014.	Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Rentang waktu ketersediaan logistik rumah tangga Pimpinan DPRD	Kota Pekanbaru	12 Bulan	2.640.000.000	Pendapatan Asli Daerah			12 Bulan	2.640.000.000,00

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Tagging	Catatan Penting	Pra Kiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Tahun n	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Tahun n+1
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
4.0.02.02.4.0.02.15.015.	Penyediaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	Kota Pekanbaru	325 Stel	1.350.000.000	Pendapatan Asli Daerah			325 Stel	1.314.000.000,00
4.0.02.02.4.0.02.15.016.	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan Lembaga DPRD	Rentang waktu penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan	Kota Pekanbaru	12 Bulan	3.183.400.000	Pendapatan Asli Daerah			12 Bulan	6.125.215.000,00
4.0.02.02.4.0.02.15.017.	Hearing/Dialog dan Sosialisasi Peraturan Daerah	Jumlah Hearing/Dialog dan Sosialisasi perda yang dilakukan	Dalam Daerah Provinsi Riau	13 Kali	10.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah			13 Kali	12.787.672.196,00
4.0.02.02.4.0.02.15.018.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Dalam dan Luar Daerah Provinsi Riau	3 Kali	5.531.025.000	Pendapatan Asli Daerah			3 Kali	8.121.626.000,00
4.0.02.02.4.0.02.15.019.	Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Daerah Provinsi Riau (Luar Negeri)	1 Kali	13.959.921.500	Pendapatan Asli Daerah			1 Kali	18.164.643.000,00
4.0.02.02.4.0.02.15.020.	Konsultasi dan Pengurusan Kunjungan Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah dokumen persyaratan kunjungan luar negeri Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Daerah Provinsi Riau	65 Dokumen	600.000.000	Pendapatan Asli Daerah			65 Dokumen	735.025.800,00
4.0.02.02.4.0.02.15.021.	Peningkatan Kapasitas layanan Kepada Lembaga DPRD	Jumlah jasa penunjang layanan tugas dan fungsi lembaga DPRD	Kota Pekanbaru	3 Laporan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah			3 Laporan	250.000.000,00
4.0.02.02.4.0.02.15.022.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Acara/Resepsi Pimpinan DPRD	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan yang disewa	Kota Pekanbaru	5 Jenis	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah			5 Jenis	245.008.600,00
4.0.02.02.4.0.02.15.023.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah koran/majalah dan peraturan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	Kota Pekanbaru	125000 Eks	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah			125000 Eks	490.017.200,00
JUMLAH					**193.966.196.900,00**					**294.223.743.801,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan rencana Program dan Kegiatan yang tertuang pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2022, maka disusun rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Provinsi Riau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DPRD						277.921.858.584,00							308.548.472.420,00	
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	175.662.066.184,00						100 Persen	141.062.698.520,00	
4	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	23.758.350.724,00						100 Persen	31.133.110.500,00	
4	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	186 Orang			186 Orang	23.758.350.724,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Publik yang Prima	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	186 Orang	31.133.110.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat kehadiran ASN	Persen		Persen	100 Persen	273.000.000,00						100 Persen	300.300.000,00	
4	2	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	195 Stel 195 Stel			195 Stel 195 Stel	273.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	195 Stel 195 Stel	300.300.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2021	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	13.704.789.445,00						100 Persen	15.420.524.020,00	
4	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	25 Jenis			25 Jenis	345.671.758,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	25 Jenis	380.239.970,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	62 Jenis 60 Unit 12 Unit 150 Unit			62 Jenis 60 Unit 12 Unit 150 Unit	3.341.244.798,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	62 Jenis 60 Unit 12 Unit 150 Unit	3.901.587.250,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	243954 Porsi			243954 Porsi	7.109.460.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	243954 Porsi	7.939.346.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	175 Jenis			175 Jenis	649.999.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	175 Jenis	715.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah dan peraturan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	125000 Eksemplar			125000 Eksemplar	400.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	125000 Eksemplar	440.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	28 Kali			28 Kali	1.858.413.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	28 Kali	2.044.350.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	2	1	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen		Persen	100 Persen	**1.248.671.910,00**						100 Persen	**1.375.000.000,00**	
4	2	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	15 Unit 20 Unit			15 Unit 20 Unit	1.248.671.910,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	15 Unit 20 Unit	1.375.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	1	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	**14.665.344.000,00**						100 Persen	**16.131.878.400,00**	
4	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	84046 Surat			84046 Surat	60.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	84046 Surat	66.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah surat yang dikirim	192 Rekening			192 Rekening	3.600.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	192 Rekening	3.960.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang disewa	5 Jenis			5 Jenis	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	5 Jenis	110.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa penunjang layanan tugas dan fungsi lembaga DPRD Jumlah tenaga administrasi yang disediakan Jumlah tenaga satpam yang disediakan Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	3 Laporan 4826 OB 852 OB 12 Bulan			3 Laporan 4826 OB 852 OB 12 Bulan	10.905.344.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	3 Laporan 4826 OB 852 OB 12 Bulan	11.995.878.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	2	1	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen		Persen	100 Persen	**5.614.486.000,00**						100 Persen	**6.725.840.000,00**	
4	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 Unit			5 Unit	225.630.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	5 Unit	249.299.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	53 Unit			53 Unit	1.556.310.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	53 Unit	2.261.787.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1 Unit 2 Unit			1 Unit 2 Unit	3.081.546.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	1 Unit 2 Unit	3.389.700.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	18 Unit 4 Unit			18 Unit 4 Unit	750.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	18 Unit 4 Unit	825.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	1	1.14		**Fasilitasi Keprotokolan**	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persen		Persen	100 Persen	**999.999.910,00**						100 Persen	**1.100.000.000,00**	
4	2	1	1.14	3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah agenda keprotokolan pimpinan DPRD dan alat kelengkapan Dewan	300 Kali			300 Kali	999.999.910,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Sekretariat DPRD Provinsi Riau	300 Kali	1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	1	1.15		**Layanan Kesangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persen		Persen	100 Persen	**62.747.424.195,00**						100 Persen	**65.972.045.600,00**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	2	1	1.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	65 Orang			65 Orang	61.001.424.425,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Publik yang Prima	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	65 Orang	64.052.545.600,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	1	1.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	325 Stel			325 Stel	1.350.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	325 Stel	1.485.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	1	1.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up	65 Orang			65 Orang	394.999.770,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	65 Orang	434.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	1	1.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persen		Persen	100 Persen	**2.640.000.000,00**						100 Persen	**2.904.000.000,00**	
4	2	1	1.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Rentang waktu ketersediaan logistik rumah tangga Pimpinan DPRD	12 Bulan			12 Bulan	2.040.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	12 Bulan	2.904.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persen		Persen	93 Persen	**157.259.792.400,00**						93 Persen	**167.485.774.100,00**	
4	2	2	1.01		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persen		Persen	93 Persen	**16.471.185.665,00**						93 Persen	**18.118.304.800,00**	
4	2	2	1.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	4.415.999.670,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Dokumen	4.862.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
4	2	2	1.01	2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Ranperda			12 Ranperda	12.061.185.995,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	12 Ranperda	13.256.304.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persen		Persen	93 Persen	**5.929.999.795,00**						93 Persen	**6.523.000.000,00**	
4	2	2	1.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Perda APBD	1 Perda			1 Perda	1.889.999.955,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Perda	2.079.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.02	4	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Perda APBD Perubahan	1 Perda			1 Perda	1.889.999.850,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Perda	2.079.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD	1 Perda			1 Perda	2.149.999.990,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Perda	2.365.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persen		Persen	93 Persen	**2.767.899.590,00**						93 Persen	**3.044.690.000,00**	
4	2	2	1.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah rekomendasi tindak lanjut LHP BPK RI	1 Rekomendasi			1 Rekomendasi	1.319.999.950,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Rekomendasi	1.452.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Rekomendasi			1 Rekomendasi	1.447.899.640,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	1 Rekomendasi	1.592.690.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase peningkatan kapasitas lembaga	Persen		Persen	93 Persen	**14.978.424.610,00**						93 Persen	**16.476.267.500,00**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						perwakilan rakyat daerah													
4	2	2	1.04	2	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali			3 Kali	5.531.024.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	3 Kali	6.084.127.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rentang waktu penyediaan jasa publikasi dan dokumentasi dewan	12 Bulan			12 Bulan	2.183.399.810,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	12 Bulan	2.401.740.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	54 Orang			54 Orang	5.400.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	54 Orang	5.940.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang			8 Orang	864.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	8 Orang	950.400.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rentang waktu penyelenggaraan hubungan masyarakat	12 Bulan			12 Bulan	1.000.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	12 Bulan	1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persen		Persen	93 Persen	53.898.999.600,00						93 Persen	59.288.900.000,00	
4	2	2	1.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah hearing/dialog dan sosialisasi perda yang dilakukan Jumlah kunjungan kerja dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD	13 Kali 52 Kali			13 Kali 52 Kali	15.499.999.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	13 Kali 52 Kali	17.050.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
4	2	2	1.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah pelaksanaan reses Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Kali			3 Kali	38.398.989.660,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	3 Kali	47.238.900.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persen		Persen	93 Persen	58.213.283.140,00						93 Persen	64.034.611.800,00	
4	2	2	1.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	33 Kali			33 Kali	49.903.671.250,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	33 Kali	54.894.038.600,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	2	2	1.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	21 Kali			21 Kali	8.509.611.890,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan Publik yang Prima	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau	21 Kali	9.340.573.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
										TOTAL	277.921.858.584,00							508.548.472.620,00	

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Optimalisasi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau merupakan hal yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan. Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau tidak terlepas dari rencana efisiensi belanja Pemerintah Daerah Provinsi Riau sesuai kebijakan rasionalisasi anggaran terhadap menurunnya kemampuan keuangan daerah dan penyesuaian prioritas anggaran daerah, hal ini mengakibatkan ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Optimalisasi yang diperlukan Sekretariat DPRD Provinsi Riau dalam pelaksanaan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Kembali kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja Aparatur dalam meningkatkan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Melakukan penyesuaian terhadap target kinerja guna mendukung program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. Melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran yang dibutuhkan.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2022 merupakan Dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang disusun berpedoman dengan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2022 telah dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan guna menjadi tolok ukur bagi proses pencapaian keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Renja Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2022 diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Sekretariat DPRD Provinsi Riau pada tahun 2022.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau pada tahun 2022 telah menetapkan 4 (empat) program, dan selanjutnya program yang ditempuh akan diimplementasikan dalam 46 (empat puluh enam) kegiatan. Keluaran dan hasil kegiatan diharapkan dapat memberikan konstribusi yang nyata terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan bagi Sekretariat DPRD Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja berikutnya.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SETWAN

MUFLIHUN, S.STP, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19780222 199701 1 001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 719, Telp. (0761) 857122, 857166 Fax. (0761) 857141
PEKANBARU

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

Nomor : **/KPTS/SEKR/DPRD/2021**

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2022 serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan berkompeten untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU**

PERTAMA : Mengesahkan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 Sekretariat DPRD Provinsi Riau dimaksud dalam diktum ke satu keputusan ini, dapat melaksanakan tugas secara penuh

tanggung jawab dalam menyiapkan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 01 Februari 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

MUFLIHUN, S.STP, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19870222 199701 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : /KPTS/SEKR/DPRD/2021
TANGGAL : 01 Februari 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muflihun, S.STP, M.AP	Sekretaris DPRD Provinsi Riau	Penanggung Jawab
2.	Irwan Suryadi	Kabag. Keuangan dan Perencanaan	Ketua
3.	Samto, S.STP, M.Si	Kabag. Persidangan dan Produk Hukum	Wakil Ketua
4.	T. Aznom Zaifani, SE, ME	Kabag. Umum	Sekretaris
5.	Ovan Rachamadano	Kasubbag Keuangan dan Perjalanan Dinas	Anggota
6.	Edwin Noviansyah, S.STP, M.Si	Kasubbag Verifikasi dan Pelaporan	Anggota
7.	Rio Armanda, S.Kom	Kasubbag Perencanaan	Anggota
8.	Yurikha Heriandanni, S.STP, M.Si	Kasubbag Komisi, Fraksi dan HAL	Anggota
9.	Wira Setiadi, S.STP, M.PA	Kasubbag Rapat dan Risalah	Anggota
10.	Reno Afriadi, SH	Kasubbag Produk Hukum	Anggota
11.	Tengku Rina Melati, S.Sos	Kasubbag Umum dan Protokol	Anggota
12.	Doddy Sukma, SE	Kasubbag Rumah Tangga, Perlengkapan dan PBMD	Anggota
13.	Raja Faisal Febnaldi, S.Sos	Kasubbag Humas dan Perpustakaan	Anggota
14.	Perdana Novalita, S.STP, M. Si	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota
15.	Siska Fitriyani Syamsuddin, S.STP	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota
16.	Rio Saputra	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 01 Februari 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI RIAU

MUFLIHUN, S.STP, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19870222 199701 1 001

FORM VERIFIKASI DOKUMEN
RENJA PD TAHUN 2022

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
1	**COVER**	JUDUL COVER : **"RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2022 DINAS/BADAN.....** (sesuai Perangkat daerah masing-masing)	V		
2	**PERGUB PENETAPAN**	Menunggu Peraturan Gubernur Riau tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Riau Tahun 2022		V	
3	**DAFTAR ISI**	Sesuai dengan Isi Renja Perangkat Daerah	V		
4	**DAFTAR TABEL**	Judul Tabel dan Halaman Tabel	V		
5	**BAB I PENDAHULUAN**				
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	V		
	1.2. Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	V		- Pergub Renja - SE pedoman penyempurnaan ranwal (52/SE/2021) - SK TIM
	1.3. Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah	V		
	1.4. Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	V		
6	**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020**				
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD	2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja	V		

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
		hasil/keluaran yang direncanakan; 2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut Menggunakan **Tabel T-C.29**			
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK Menggunakan **Tabel T-C.30**	V		Perlu perbaikan pada table 2.8 (target renstra 2020-2023, Proyeksi 2022 & 2023)
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; -Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; -Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*); -Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan -Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.	V		
	2.4. Review terhadap RKPD	Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan baru yang tidak terdapat pada RKPD, atau program dan kegiatan/sub kegiatan cocok namun besarannya berbeda; Menggunakan **Tabel T-C.31**	V		
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan	Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh. Misalnya	V		

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
	Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	melalui Forum SKPD atau kegiatan lainnya; Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; Menggunakan **Tabel T-C.32**			
7	**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**				
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	V		
	3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	V		
	3.3. Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/sub kegiatan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Menggunakan **Tabel T-C.33**	V		Pada table 3.2,untuk kolom prioritas Nasioal/ Daerah tidak perlu di masukan
8	**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**				
		Diambil dari SIPD Menu Laporan ==> Renja ==> Penetapan - Penetapan RKPD 2022.	**V**		
9	**BAB V PENUTUP**	1.Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 2.Kaidah-kaidah pelaksanaan. 3.Rencana tindak lanjut. 4.Pada bagian lembar terakhir dicantumkan **tempat** dan **tanggal** dokumen, **nama Perangkat Daerah** dan **nama** dan **tanda tangan kepala Perangkat Daerah**, serta **cap** perangkat daerah yang bersangkutan.	V		
10	**LAMPIRAN**	1. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 2. Hasil Verifikasi Dokumen Renja PD pada tahapan sebelumnya.	V		

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
		3. Hasil Pemetaan program dan kegiatan ke Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

MUFLIHUN, S.STP, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19780222 199701 1 001

Pekanbaru, Juli 2021

Verifikator :

1. HERI YANTO, S.HUT, MT
   NIP. 197[illegible]26 199803 1 006

2. ARI DIANUARI
   NIP. 19810103 200901 1 002

3. RAISA WISUDAWATI
   NIP.19901225 201010 2 001

PEMETAAN

PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH UNTUK TAHUN 2022 TERHADAP PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMUTAHIRAN PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

RENSTRA PD UNTUK TAHUN 2022							PEMUTAHIRAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)					
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
	4.0.02.12.0.11.0.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran			4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
	4.0.02.02.0.11.0.0.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur								
	4.0.02.02.0.00.33	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Persentase Tingkat Kehadiran ASN								
							4.02.01.0.05.			Administrasi Penyelenggaraan Perangkat Daerah		219.[illegible]
							[illegible]				Pengadaan Barang Milik Daerah Berupa [illegible]	[illegible]
	[illegible]		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	[illegible]	111.796.175						[illegible]
	[illegible]		Pengadaan Pakaian Khusus Dinas Dan Tanda Jabatan	Jumlah pakaian khusus dan tanda jabatan yang disediakan	100 Stel	132.126.752						132.500.000
							[illegible]			Administrasi Urusan Perangkat Daerah		12.863.024.200
	[illegible]		Penyediaan Komponen Instalasi Jaringan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi jaringan/penyediaan bangunan kantor yang disediakan	[illegible]	828.375.000	[illegible]				Penyediaan Komponen Instalasi Jaringan Bangunan Kantor	345.075.200

RENSTRA PD UNTUK TAHUN 2022							PEMUTAHIRAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)					
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)
							[illegible]				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	[illegible]
	[illegible]		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	[illegible]	33.225.000						30.000.000
	[illegible]		Pengadaan Alat Tulis Kantor	Jumlah unit Alat Tulis Kantor yang disediakan	[illegible]	[illegible]						[illegible]
	[illegible]		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	[illegible]	[illegible]						[illegible]
	[illegible]		Pengadaan [illegible] Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	[illegible]	[illegible]						[illegible]
							[illegible]				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	[illegible]
	[illegible]		Penyediaan [illegible] dan Makanan	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	[illegible] Paket	[illegible]						[illegible]
	[illegible]		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	[illegible] Kali	[illegible]						[illegible]
	[illegible]		Tagihan Listrik Perkantoran	Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan	[illegible]	[illegible]						[illegible]
	[illegible]		Penyediaan Tenaga Pelayanan Umum Honorer Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah personil honorer anggota DPRD Provinsi Riau	[illegible]	[illegible]						[illegible]
							[illegible]				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	[illegible]
	[illegible]		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	[illegible] Jenis	[illegible]						[illegible]
	[illegible]		Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan								[illegible]
	[illegible]		Penyediaan Tenaga Ahli Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah personil ahli anggota DPRD Provinsi Riau								[illegible]
	[illegible]		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah koleksi perpustakaan dan peraturan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	[illegible] Eks	[illegible]	[illegible]				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	[illegible]
	[illegible]		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Urusan Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi urusan daerah	[illegible] Kali	[illegible]	[illegible]				Pemanfaatan Hasil Konsultasi dan Konsultasi SKPD	[illegible]
							[illegible]			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.250.000.000
							[illegible]				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.250.000.000

RENSTRA PD UNTUK TAHUN 2022							PEMUTAKHIRAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)					
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)
	[illegible]		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang disediakan	[illegible]	[illegible]						[illegible]
	[illegible]		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang disediakan	[illegible]	[illegible]						[illegible]
							[illegible]			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		[illegible]
	[illegible]		Pemeliharaan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Sarana yang Dipelihara	[illegible]	[illegible]	[illegible]				Penyediaan Jasa Sosial Masyarakat	[illegible]
	[illegible]		Pemeliharaan Jaringan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jaringan yang dipelihara	[illegible] jaringan	[illegible]	[illegible]				Penyediaan Jasa Jaringan Data Sumber Daya Air dan Listrik	[illegible]
	[illegible]		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Pakai Habis Kantor DPRD	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan yang dibayar	[illegible] orang	[illegible]	[illegible]				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan	[illegible]
							[illegible]				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Pakai Habis Kantor	[illegible]
	[illegible]		Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	[illegible]	[illegible]						[illegible]
	[illegible]		Penyediaan Jasa Komunikasi Kantor	Jumlah tenaga internet yang disediakan	[illegible]	[illegible]						[illegible]
	[illegible]		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa cleaner dan kantor	[illegible]	[illegible]						[illegible]
	[illegible]		Penyelenggaraan Kegiatan Internal Sekretariat DPRD	Jumlah jasa penunjang kegiatan tugas dan fungsi sekretariat DPRD	[illegible]	[illegible]						[illegible]
	[illegible]		Rapat-Rapat Fraksi	Jumlah rapat dan surat yang dikoordinasikan								[illegible]
	[illegible]		Penyediaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Riau	Jumlah peripurna PAW Anggota DPRD Provinsi Riau								[illegible]
							[illegible]			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		[illegible]
	[illegible]		Penyediaan Jasa Pengamanan dan Pengamanan Lingkungan Kantor/Gedung	Jumlah pengamanan dinas/gedung yang disediakan	[illegible]	[illegible]	[illegible]				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Pakai Habis Gedung Kantor dan Gedung Jabatan	[illegible]
	[illegible]		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	[illegible]	[illegible]	[illegible]				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	[illegible]

RENSTRA PD UNTUK TAHUN 2022							PEMUTAHIRAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)					
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)
							4.02.02.1.09.03				[illegible]	3.301.000.000
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	1 Jiw	1.525.000.000						[illegible]
	4.02.02.1.09.10.002		[illegible]	[illegible]	2 Unit	[illegible]						3.159.000.000
							4.02.02.1.09.11				[illegible]	750.000.000
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	4 Unit	385.230.000						730.000.000
	4.02.02.1.09.10.016		[illegible]	[illegible]	10 Unit	497.900.000						[illegible]
URUSAN PENDUKUNG								URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
	4.02.10.02.4.0.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN RAKYAT (KPRH)		Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Rakyat Desa/Kel			4.02.10		PROGRAM PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
							4.02.01.1.01.1.14			Tata Naskah Kepemimpinan		1.000.000.000
	4.02.01.2.4.02.1.0.1		Pemberdayaan Kapasitas Pengurus Dewan Kelurahan Desa	Lembaga kemasyarakatan pengurus Dewan Kelurahan/Desa	100 Kel	[illegible]	4.02.01.1.01.1.14.15				Pengadaan [illegible]	[illegible]
							4.02.01.1.01.1.15			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		1.745.000.000
	4.02.10.02.4.02.15.013		Pengadaan Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	225 Stel	1.317.000.000	4.02.01.1.01.1.16				Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	350.000.000
	4.02.10.02.4.02.15.015		Pemeliharaan kendaraan dinas pengurus pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah kendaraan dinas Anggota DPRD yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Lainnya	55 Orang	900.000.000	4.02.01.1.01.1.16.01				Pakaian Dinas Medis Check Up DPRD	90.000.000
							4.02.01.1.01.1.16			Layanan Administrasi DPRD		2.600.000.000
	4.02.02.02.4.1.02.15.015		Penyediaan Logistik Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Kelengkapan rumah tangga dan logistik Pimpinan DPRD	12 Paket	2.600.000.000	4.02.01.1.01.1.16.04				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.600.000.000
							4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
							4.02.02.1.01			Pemantapan Fungsi dan Peraturan DPRD		10.471.399.200
	4.02.02.02.4.2.02.15.001		Pemantapan Fungsi dan Peraturan Dewan	Jumlah Dokumen Program Pemantapan Peraturan Daerah	3 Dokumen	7.000.000.000	4.02.02.1.01.01				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	7.000.000.000

RENSTRA PD UNTUK TAHUN 2022							PEMUTAHIRAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)					
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)
							[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
							[illegible]			Pemutakhiran Penjabaran Anggaran		5.330.000.000
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
							[illegible]				[illegible]	[illegible]
							[illegible]				[illegible]	[illegible]
							[illegible]			Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas		2.767.400.000
							[illegible]				[illegible]	[illegible]
							[illegible]				[illegible]	[illegible]
							[illegible]			Pengadaan Perlengkapan Kantor Kepala Daerah		14.578.435.100
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]

RENSTRA PD UNTUK TAHUN 2022							PEMUTAHIRAN PMDN NO. 90 TAHUN 2019 (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)					
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
	[illegible]		Rapat [illegible] DPRD	[illegible]	1 Bulan	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
							[illegible]			Pagu [illegible] DPRD		[illegible]
							[illegible]				[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible] Kal	[illegible]						[illegible]
			[illegible]	[illegible]								[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible] Dokumen	[illegible]						[illegible]
							[illegible]				[illegible] DPRD	[illegible]
			[illegible]	[illegible]								[illegible]
JUMLAH						271.976.791.667	JUMLAH					197.936.196.900

SEKRETARIS DPRD PROVINSI RIAU

MUFLIHUN, S.STP, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19780222 199701 1 001